



KESELARASAN PROGRAM & KEGIATAN TAHUN 2026

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Jln. Setia Budi No. 200 Painan Kode Pos : 25651
Telp. (0756) 21293, E-mail : dpmdppkbpessel@gmail.com



<https://dpmd.pesisirselatankab.go.id/>
DPMD Kab. Pesisir Selatan

KERTAS KERJA EVALUASI
PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENSTRA
Keseharaan Kinerja-Output-Penganggaran

NAMA SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN : 2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS BERORIENTSI HASIL (Ya/Tidak)	NO.	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS BERKUALITAS (Ya/Tidak)	IKU/Bukan IKU	NO.	PROGRAM			SASARAN PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN STRATEGIS (Ya/Tidak)	KEGIATAN			SASARAN KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN PROGRAM (Ya/Tidak)	ANGGARAN (Rp.)		CATATAN	
								URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM		URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT		
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Ya	1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Ya	IKU	1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Ya	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ya	Rp	27.876.000	Rp	-
												Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ya	Rp	3.856.890.529	Rp	-
												Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Ya	Rp	5.564.000	Rp	-
												Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ya	Rp	225.880.120	Rp	-
												Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ya	Rp	231.036.000	Rp	-
												Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Ya	Rp	165.200.000	Rp	-
												Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Ya	Rp	165.200.000	Rp	-
												Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Ya	Rp	165.200.000	Rp	-
												Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Ya	Rp	165.200.000	Rp	-
												Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Ya	Rp	165.200.000	Rp	-
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Ya	Rp	165.200.000	Rp	-									
			2.	Jumlah Nagari Mandiri	Ya	IKU	2.	Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang memiliki Pengelolaan Administrasi yang baik	Ya	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Ya	Rp	964.099.750	Rp	-
			3.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Ya	IKU	3.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat	Ya	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelaksana Hukum Adat yang Masyarakat Pel							

